

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujukan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Nur Awlia Az'ari (2019) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI	Variabel Independen : Komisaris independen, Dewan direksi, Komite audit dan Kepemilikan manajerial Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Deskriptif kuantitatif	Komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Hanya dewan direksi yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan
2	Vivie Nurhidayah (2020) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Di BEI	Variabel Independen : Komisaris independen, Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, Komite audit dan Dewan direksi Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Deskriptif kuantitatif	komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan dewan direksi, dapat meningkatkan kinerja keuangan.
3	Ryan Muhammad Muttawaqil Billah (2021) Analisis <i>Good Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada	Variabel Independen : Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Ukuran perusahaan Variabel Dependen :	Deskriptif kuantitatif	kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan Ukuran perusahaan berpengaruh

	Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2018	Kinerja Keuangan		Lanjutan..... signifik kinerja keuangan
4	Salli Kho (2020) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen : Dewan komisaris, Dewan direksi, Komisaris independen, Kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Deskriptif kuantitatif	secara parsial dan simultan, kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) dewan komisaris, dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap return on equity; (2) komite audit berpengaruh signifikan terhadap return on equity; (3) dewan komisaris, dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap return on equity.
5	Roza Mulyadi (2016) Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel Independen : Komisaris independen, Komite audit Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Deskriptif kuantitatif	Ukuran komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan
6	Jaya Laksana (2015) <i>Corporate governance</i> dan kinerja keuangan (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012).	Variabel Independen : Dewan Direksi, Komisaris independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Variabel Dependen :	Deskriptif kuantitatif	Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan, Komisaris independent tidak berpengaruh signifikan , Kepemilikan Manajerial berpengaruh negative signifikan, Kepemilikan Institusional berpengaruh negative signifikan

Dilanjutkan.....

Lanjutan.....

		Kinerja Keuangan		
7	<i>Victor-Octavian Müller (2020) The impact of board composition on the financial performance of FTSE100 constituents</i>	<i>Independent variable :</i> <i>Board independence, directors size</i> <i>Dependent variable :</i> <i>financial performance</i>	<i>Quantitative Descriptive</i>	<i>board independence and the proportion directors in the total number of directors (as characteristics of corporate board composition) have a significant strong positive impact on firm performance (both contemporaneous and subsequent).</i>

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengembangkan penelitian terdahulu yakni Nur Awlia Az'ari (2019), Vivie Nurhidayah (2020), Ryan Muhammad Muttawaqil Billah (2021), Salli Kho (2020), Roza Mulyadi (2016), Laksana J (2015) dan Victor-Octavian Müller (2020) yang sama-sama menggunakan variabel *Good Corporate Governance* yang di proksikan dengan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Penelitian terdahulu pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance* serta konsep yang menjelaskan hubungan

kontraktual antara principals dan agents. Dalam hal ini principal adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan yang dimaksud dengan agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan. *Agency theory* menekankan akan pentingnya pemisahan kepentingan antara principal dan agen. Disini terjadi penyerahan pengelolaan perusahaan dari principals kepada agens. Tujuan dari pemisahaan pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar principal memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin ketika perusahaan tersebut dikelola oleh agen.

Menurut Jensen dan Meckling, 1976 (dalam Melani dan Wahidahwati, 2017) mengatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara menejer (agent) dengan investor (pemilik). Konflik kepentingan antara pemilik dan agent terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan pemilik sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing–masing pihak berusaha mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Teori agensi juga menjelaskan asimetri informasi, di mana manajer memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan

pemilik (pemegang saham), sehingga manajer cenderung melakukan manipulasi melalui manajemen laba untuk kepentingan pribadi. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen dapat dikurangi dengan adanya mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan kepentingan yang ada di dalam perusahaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori agensi menjelaskan bagaimana menyelesaikan atau mengurangi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis yang berdampak merugikan. Untuk menghindarkan konflik diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan mendapatkan informasi yang sama dan lengkap dengan yang dimiliki oleh manajemen. Aspek *good corporate governance* seperti komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial dalam penelitian ini dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan.

2.2.2. *Good Corporate Governance (GCG)*

2.2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Perusahaan sebaiknya menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan perlu dipertahankan, salah satunya melalui tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). Komite

Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2004 (dalam Heder dan Priyadi, 2017) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai proses dan suatu struktur yang dipakai perusahaan untuk memberi nilai tambah agar keberlanjutan perusahaan bagi pemegang saham, dengan tetap memikirkan setiap kepentingan stakeholder, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan juga norma-norma yang berlaku. Untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) (Indarti, 2013). Menurut Sukandar (2014) penerapan dan *pengelolaan corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa esensi dari *Good Corporate Governance* antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

2.2.2.2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), terdapat lima prinsip dalam *good corporate governance* yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdersnya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

2. Kemandirian (*Indenpency*)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlau dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Accountability yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency*

problem (benturan kepentingan peran). Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

4. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Responsibility adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Fairness adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan

semua orang yang terlibat di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kewajaran stakeholder.

2.2.2.3. Manfaat Good corporate Governance

Menurut Agoes (2009:106) mengemukakan bahwa ada beberapa manfaat dari GCG :

1. Dengan pengelolaan yang berdasar pada asas keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian dengan kewajaran dan kesetaraan dapat mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan.
2. Dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham telah mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing perusahaan.
3. Mendorong investor, dewan komisaris, dan anggota direksi melandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap aturan undang-undang dalam membuat keputusan dan menjalankannya.
4. Timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi investor dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Mengembangkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga kepercayaan pasar dapat meningkat dan mendorong laju investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

2.2.2.4. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme adalah suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu aturan yang menjelaskan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang melakukan kontrol serta pengawasan terhadap keputusan yang dibuat tersebut. Salah satu fungsi dari mekanisme ini dipercaya dapat meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Variabel *good corporate governance* diukur melalui mekanisme *good corporate governance* yang merupakan sebuah syarat dalam melakukan sistem di suatu perusahaan. Menurut Sutedi (2012) mekanisme *good corporate governance* diantaranya mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal.

Penelitian ini hanya berfokus pada *good corporate governance* yang di proksikan dengan ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran kepemilikan manajerial. Pengukurannya sebagai berikut :

1. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang

tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

Tabel 2.2 Ukuran Komisaris Independen

Range	Score
0% - 20 %	2
21% - 40%	4
41% - 60	6
61% - 80	8
81% and above	10

Sumber : Pujiati (2013)

2. Dewan Direksi

Manajemen atau direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan direksi adalah jumlah keseluruhan anggota dewan direksi.

Tabel 2.3 Ukuran Dewan Direksi

Range	Score
0-3	2
4-6	4
6-8	6

9-11	8
>11	10

Sumber : Pujiati (2013)

3. Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen. Ukuran komite audit yaitu jumlah total anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan.

Tabel 2.4 Ukuran Komite Audit

Range	Score
0-3	2
4-6	4
6-8	6
9-11	8
>11	10

Sumber : Pujiati (2013)

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dengan presentase kepemilikan saham dewan direksi dan dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

Tabel 2.5 Ukuran Kepemilikan Manajerial

Range	Score
0% - 20 %	2
21% - 40%	4
41% - 60	6
61% - 80	8
81% and above	10

Sumber : Pujiati (2013)

2.2.3. Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh perusahaan. Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha atau perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Kinerja keuangan merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dari perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba, sehingga bisa dilihat sejauh mana potensi pertumbuhan dan perkembangan dari perusahaan tersebut (Nabilah, 2018).

Kinerja keuangan menjadi patokan utama yang bisa digunakan untuk mengukur serta mengetahui baik atau tidaknya kinerja keuangan pada suatu perusahaan (Sarafina, 2017). Kinerja keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian *financial performance* tersebut.

Munawir (2014:31) dalam Karissa (2019) mendefinisikan bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas
4. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha

Pemegang saham menginginkan bahwa kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas (*shareholder's equity*) yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih dan untuk mengetahuinya menggunakan banyak berbagai alat ukur rasio yaitu seperti ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), PBV (*Price to Book Value Ratio*), *Earning Per Share*, *Growth* , dll. Namun dalam penelitian ini dengan mengetahui keuntungan laba yang sebanyak-banyaknya para investor akan lebih tertarik untuk menanamkan dananya pada perusahaan tersebut tanpa rasa takut akan tidak kembalinya dana atau *return* yang diharapkan dapat dihasilkan di masa depan. Ini dapat dilihat menggunakan rasio *Net Profit Margin* (NPM) yaitu berfungsi menghitung keuntungan dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan (Kasmir, 2015:135). Maka dengan itu kinerja pada perusahaan akan semakin baik dan meningkat untuk memperoleh laba yang tinggi dan alat ukur NPM juga dapat mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan laba. Standar rasio industri profitabilitas untuk NPM adalah sebesar 20% (Kasmir, 2008:208).

Menurut (Apriyanti & Bachtiar ,2018) *net profit margin* ialah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar *net profit margin* yang dimiliki perusahaan maka, kinerja pada perusahaan akan semakin baik dan meningkat untuk memperoleh laba yang tinggi. Sehingga hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Apriyanti (2018), *net profit margin* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPM = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan}}$$

2.3. Pengaruh Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Good corporate governance adalah sistem yang mengontrol hubungan antar pelaku dalam perusahaan demi meningkatkan kinerja dan tujuan perusahaan. Komisaris Independen berperan penting dalam penerapan *good corporate governance* bertugas memastikan pelaksanaan strategi perusahaan, melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Jadi apabila semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, semakin tinggi dan ketat pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang dapat memperkecil kecurangan dan ketidak transparan pihak-pihak manajemen sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik

2.3.2. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Direksi berperan sebagai pimpinan sebuah perusahaan yang melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan. Direksi memastikan perusahaan sudah menjalankan semua ketentuan yang diatur pada Anggaran Dasar dan aturan Perundangan yang ditetapkan (Yermark, 1996 dalam Sari 2020). Dewan direksi yang melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai kepentingan dan tujuannya dapat meningkatkan kinerja dalam perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Az'ari (2019) dan Nurhidayah (2020) hasilnya menunjukkan bahwa dewan direksi dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2.3.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh pihak lain yang dibentuk dewan komisaris, tugasnya adalah memperkuat dan membantu fungsi dari dewan komisaris saat melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, manajemen risiko, penerapan *corporate governance*. Bapepam melalui surat edaran No. 03/PM/2000 yang diajukan kepada direksi dan perusahaan publik yang mewajibkan dibentuknya komite audit (Nurhidayah, 2020). Menurut peraturan OJK jumlah komite audit paling sedikit terdiri 3 (tiga) orang anggota.

Komite audit mempunyai peranan yang penting dalam hal memelihara kredibilitas laporan keuangan seperti dilaksanakannya *good corporate governance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah

(2020) hasilnya menunjukkan bahwa komite audit dapat meningkatkan kinerja keuangan. Komite Audit berperan penting untuk mengawasi audit eksternal dan mengawasi pengelolaan internal perusahaan, karena semakin besar komite audit maka semakin besar pula pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dan dapat menekan sekecil mungkin akan tindakan kecurangan-kecurangan. Besarnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan pada laporan keuangan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

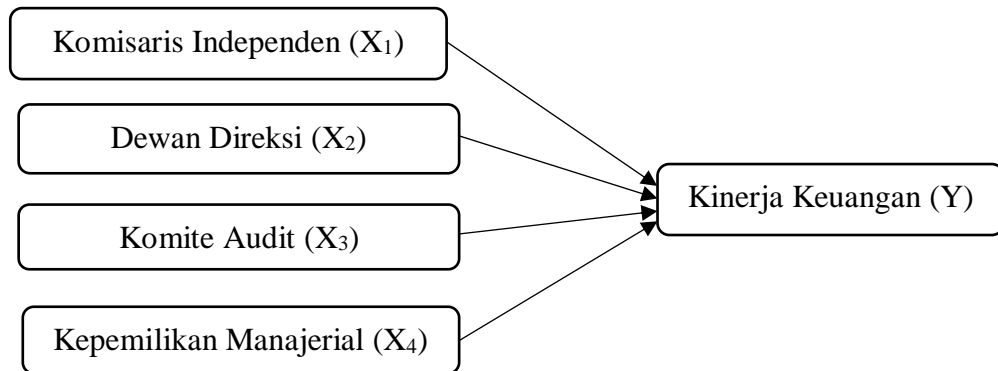
2.3.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Struktur kepemilikan dalam perusahaan yang salah satunya yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat menjadi pendorong dalam meningkatnya kinerja perusahaan. Dengan demikian kepemilikan manajerial selaku pemegang saham dapat lebih berhati-hati dalam tindakan kecurangan manipulasi data. Karena meningkatnya kepemilikan manajerial, maka keputusan yang diambil oleh dewan akan lebih cenderung untuk menguntungkan dirinya dan secara keseluruhan akan merugikan perusahaan sehingga kemungkinan kinerja keuangan perusahaan akan cenderung mengalami penurunan

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dirancang untuk dapat lebih memahami konsep penelitian yaitu pengaruh *Good Corporate Governace* (GCG) terhadap kinerja keuangan, karena kerangka konsepnya merupakan hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari

masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual terdiri dari variabel dependen dan independen dari suatu penelitian. Sehingga kerangka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

- H_1 : Ada pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan
- H_2 : Ada pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan
- H_3 : Ada pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan
- H_4 : Ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan